

AWAS RADIKALISME MASUK KAMPUS

BASIS

menembus fakta

Sosok *Criticus Indonesianus*

Berkabar
Buku Jassin

Peluh Para
Penerjemah

Sastra Digital &
Nilai Religius

Foto Dokumentasi HB JASSIN MUDA

EDISI KHUSUS 100 TAHUN HB JASSIN

Rp 25.000.00

NOMOR.07 - 08, TAHUN KE-66, 2017

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.
Jo Ditjen PPG
Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996
Penerbit

Yayasan BP Basis
Anggota SPS ISSN: 0005-6138
Penasihat

Franz Magnis-Suseno
P Swantoro

Pemimpin Umum
Sindhunata

Pemimpin Redaksi
A. Setyo Wibowo
Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarja
Redaktur Pelaksana

A. Bagus Laksana
Wakil Redaktur Pelaksana
Purnawijayanti

Redaksi
B. Hari Juliawan

Heru Prakosa
B. Rahmanto

C. Bayu Risanto
Redaktur Artistik

Hari Budiono
Purnawijayanti

Promosi/ Iklan
Slamet Riyadi, A. Yulianto

Administrasi/ Distribusi
Maria Dwijayanti

Agustinus Mardiko
Keuangan

Francisca Triharyani, Ani Ratna Sari

Alamat
Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta
Telepon: (0274) 6508836, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:
basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: basismajalah@yahoo.com

Rekening:
BCA Sudirman Yogyakarta
No. 0370285110 a.n. Sindhunata
BRI Cik Ditiro Yogyakarta

No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata
BNI Cab. Yogyakarta No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN / **Heru Prakosa**
Kala Kata Mendakwa ... 2

KACABENGGALA / **A. Bagus Laksana**
Awat, Radikalisme Masuk Kampus! ... 4

100 Tahun HB Jassin / **Fauzi Sukri**
HB Jassin: *Sosok Criticus Indonesianus* ... 13

100 Tahun HB Jassin / **Han Putro Widyono**
HB Jassin di Luar Ingatan ... 22

100 Tahun HB Jassin / **Arif Fitra Kurniawan**
Peluh Para Penerjemah ... 29

100 Tahun HB Jassin / **Yusri Fajar**
Makanan, Relasi Sosial, dan Identitas ... 36

100 Tahun HB Jassin / **Dian Nurrachman**
Sastra Digital dan Nilai Religius ... 43

100 Tahun HB Jassin / **Hamzah Muhammad**
Ibu Memperkenalkan Namanya,
Saya Membaca Ceritanya ... 48

100 Tahun HB Jassin / **Saifur Rohman**
Sastra Indonesia sebagai Catatan Kaki Jassin ... 54

100 Tahun HB Jassin / **Bandung Mawardi**
Berkabar Buku Jassin ... 57

100 Tahun HB Jassin / **B. Rahmanto**
Seperti Jassin, Pengajaran Sastra pun
Mulai Dilupakan ... 64



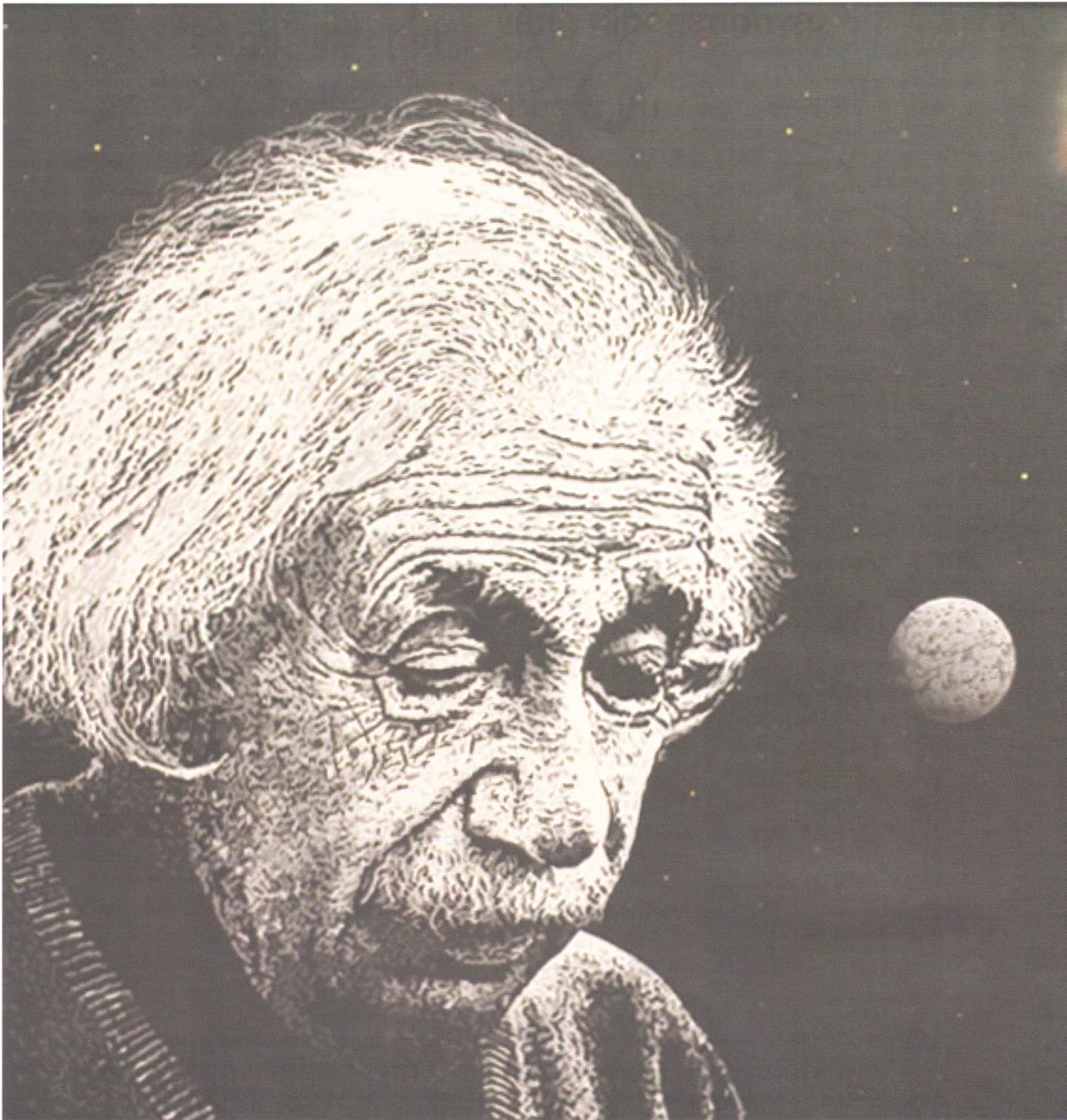
Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta ☎ 513873



Kami melayani:

- * Reservasi e-tiket pesawat dalam dan luar negeri
- * Reservasi e-tiket kereta api
- * Reservasi e-voucher hotel dalam dan luar negeri
- * Paket tour dalam dan luar negeri
- * Pembuatan kartu identitas pelajar internasional/ ISIC

- * MICE
- * Pengurusan paspor, visa dan asuransi perjalanan
- * Medical evacuation & charter flight
- * Money changer



FELIX S. WANTO, "Jagad Raya", 145 x 200 cm, akrilik di atas kanvas, 2016

Awas, Radikalisme Masuk Kampus!

A . B A G U S L A K S A N A

Beberapa waktu yang lalu, sempat muncul sebuah wacana yang agak riuh mengenai usaha memberantas radikalisme di kampus.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, mengusulkan bahwa mekanisme pemilihan rektor semestinya mendapatkan persetujuan presiden. Karena, disinyalir gerakan ideologi radikal telah menyusup ke kampus, tidak hanya di antara para mahasiswa, tetapi juga dosen dan pejabat universitas. Bagi beberapa pengamat, wacana ini dipahami sebagai intervensi yang berlebihan dari pemerintah pada kehidupan kampus.

Tentu saja, kita amat prihatin akan gerakan radikal agamis di lingkungan universitas. Namun seringkali kita tergoda untuk menanggapi gejala seperti itu dengan menggunakan visi dan strategi yang sudah terlalu jamak dan generik. Seakan-akan tidak ada bedanya antara universitas dan lembaga lain, seakan-akan kita lupa akan ciri khas universitas. Dalam konteks universitas,

belum tentu semua strategi anti-radikalisme itu tepat sasaran. Sebagai bagian dari usaha untuk melawan radikalisasi kampus, Universitas Gadjah Mada (UGM) mendeklarasikan diri sebagai kampus Pancasila. Namun, apa sesungguhnya arti sebuah universitas Pancasila? Apakah yang Pancasila? Pembinaan karakter mahasiswa, interaksi etis antar pelbagai komponen di dalamnya, ataukah terutama terkait dengan visi keilmuan dan interaksi antar disiplin ilmu yang mestinya dikembangkan sebagai universitas? Namun, tidak mudah juga untuk berbicara mengenai visi keilmuan yang Pancasila karena ilmu memiliki dinamika tersendiri yang tidak begitu saja bisa di-Pancasila-kan.

Selain itu, kata *pancasilais* pun tidak bisa dimaknai secara tunggal. Maka, persoalan radikalisme di kampus mestinya dihubungkan dengan sifat universitas sebagai lembaga ilmiah dan akademik serta sebagai wahana pendidikan tinggi. Cara mengatasi radikalisme di kampus semestinya tidak dijalankan hanya dengan program-program tempelan dan musiman yang bisa dilaksanakan di mana saja, tetapi tidak menysar universitas sebagai lembaga keilmuan dan pendidikan.

Salah satu ranah yang mendesak untuk digarap adalah perihal epistemologi dan cara kerja ilmu yang rupanya tidak seluruhnya dipahami dan dipraktikkan dalam lingkup universitas dan lembaga pendidikan tinggi dan dinamika keilmuan di tanah air. Yang dimaksud dengan epistemologi keilmuan di sini adalah terutama berkaitan dengan pengandaian-pengandaian dasariah mengenai hakikat dan cara kerja ilmu-ilmu, mengenai identitas dan metodologi keilmuan, dan bukan mengenai isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari ilmu-ilmu itu. Tak boleh dilupakan juga adalah interaksi interdisipliner dari ilmu-ilmu, sesuatu yang kurang disadari dalam desain pembentukan fakultas dan pengaturan prodi di universitas-universitas kita, khususnya interaksi antara rumpun ilmu eksakta (sains), teknologi, dan ilmu humaniora (humanities).

Ilmu teknik dan radikalisme

Menurut penelitian ilmiah, ditemukan kenyataan menarik bahwa mahasiswa teknik lebih rentan terhadap radikalisme, seperti yang ditunjukkan oleh Diego Gambetta dan Steffen Hertog. Kedua peneliti ini mengumpulkan data dari pelbagai gerakan radikal di lingkungan Islam dan ratusan aktivis yang berasal dari 30 negara di Timur Tengah dan Afrika, yang



kebanyakan lahir antara 1950-an dan 1970-an. Beberapa orang Indonesia yang terlibat dalam gerakan ini juga disebut. Penelitian ini mengagetkan karena ternyata gerakan radikal ini lebih menggoda bagi mereka yang memiliki pendidikan universitas, bukan orang-orang muda yang miskin, seperti yang dipercayai banyak orang di Indonesia. Secara lebih khusus, di antara kaum terdidik, para insinyur (*engineers*) memiliki kemungkinan tiga atau empat kali lebih besar untuk



JOKO "GUNDUL" SULISTYONO, "Peace Keeper", 140 x 200 cm, mixed media, 2016

menjadi radikal dan teroris, daripada mereka yang berprofesi dalam bidang keuangan, kedokteran, maupun ilmu-ilmu eksakta (*the sciences*) meskipun ada juga yang berlatar belakang seperti ini. Ditemukan juga bahwa 60% dari para teroris di Barat memiliki latar belakang ilmu teknik (*engineering*). Kemudian, sebanyak 8 orang dari 25 teroris yang melakukan serangan 11 September 2001 juga berlatar belakang teknik. Secara keseluruhan, 44,9% dari mereka yang terlibat dalam radikalisme memiliki

ijazah teknik (Gambetta dan Hertog 2016: 4, 11).

Lalu apa sebabnya? Ternyata, bukan saja karena fakultas dan program studi teknik (*engineering*) amat populer, bukan juga karena para insinyur itu memiliki kemampuan teknis untuk merakit bom. Menurut Gambetta dan Hertog, salah satu sebabnya adalah para insinyur ini tidak diserap oleh pasar tenaga kerja pada tahun 1980-an dan menjadi frustrasi. Di Arab Saudi, keadaannya tidak demikian karena mereka diserap oleh



IDA BAGUS ALIT, "Harmoni", 30 x 30 cm, akrilik di atas kanvas, 2016

pasar tenaga kerja. Selanjutnya, para insinyur memiliki mentalitas amat religius dan konservatif. Menurut data, 46% para insinyur pria di Amerika memiliki sikap konservatif dan religius, dibandingkan dengan 20% ilmuwan eksakta. Sebab lain yang disebut adalah: para insinyur itu tidak memiliki ketahanan untuk bersikap terhadap ambiguitas dan kompromi. Mereka terobsesi pada keteraturan, presisi dan kepastian, sehingga ideologi agamis yang kaku malahan menarik bagi

mereka. Mereka cerdas dalam bidang ilmunya, tetapi tidak kritis. Karena latar belakang pemikiran seperti ini, mereka tidak bisa melihat gejolak modernitas dan sekularisme dengan cara yang lebih imbang dan bernuansa (Gambetta dan Hertog 2016; Popper 2009).

Ternyata, Indonesia pun disinyalir memiliki gejala yang mirip, meski belum ada data yang pasti. Seperti disebut Prof. Nur Syam, Munawir Syadzali sebagai menteri agama pernah memberi pernyataan yang

kontroversial, bahwa gerakan radikal Islam itu justru tumbuh di perguruan tinggi yang mengembangkan program studi ilmu eksakta (yang di Indonesia juga mencakup ilmu teknik). Meskipun tidak memberikan alasan-alasan yang khusus, Nur Syam mengamini bahwa fakultas sains dan teknologi memang lebih kondusif untuk pengembangan paham radikal (“Deradikalisasi Melalui Perguruan Tinggi”: <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=2571>). Dalam nada yang sama, seorang intelektual dari Muhammadiyah, Zuly Qodir yang meneliti mengenai masuknya paham radikalisme di kampus UGM, pernah mengatakan: “Masuknya paham itu justru di Fakultas Teknik, Kedokteran, dan MIPA. Dan kini sudah menyebar ke fakultas lain dan universitas lainnya seperti UNY, UII, UMY dan perguruan tinggi lain.” (<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/06/058881954/rektor-ugm-panut-mulyono-kampus-adalah-benteng-pancasila>)

Sains dan modernitas

Salah satu titik penting dalam hubungan antara ilmu sains-teknologi dan radikalisme yang terpapar di atas barangkali terletak dalam ketidakpahaman, atau pemahaman yang tak lengkap dan keliru, atas asumsi epistemologis yang ada di balik cara kerja ilmu teknik dan sains. Ilmu Teknik dan Sains begitu sering dipahami dan dipraktikkan sebagai ilmu yang berisikan hukum-hukum yang baku dan pasti (eksak), yang objektif dan memberikan keteraturan yang pasti, yang dikembangkan dalam laboratorium yang terpisah dari pengaruh eksternal, termasuk pelbagai unsur budaya dan kepentingan, baik pribadi, kolektif maupun korporat (kapital dan sebagainya). Tidak disadari juga adanya aspek konstruktif, yaitu bahwa setiap ilmu tumbuh karena ada peran subjek-subjek (ilmuwan) dan pelbagai jaringan yang tidak bersifat objektif saja.

Kekeliruan ini diperparah juga dengan pemahaman yang sepihak atas kondisi-kondisi yang menjadi lingkungan bagi tumbuh suburnya sains dan teknologi, yaitu modernitas. Ilmu Teknik dan Sains berkembang pesat pada zaman modern, begitu juga dengan radikalisme seperti yang kita lihat sekarang. Sangat mungkin ada yang keliru dalam pemahaman dan pengajaran keilmuan di universitas, sehingga menghasilkan cara pikir yang tidak benar dan sempit mengenai cara kerja ilmu dalam hubungannya juga dengan realitas yang lebih luas. Kekeliruan ini tentu tidak selalu berujung pada radikalisme dan terorisme,

tetapi bisa salah satu kondisi yang ikut menjelaskan kenapa para insinyur atau mahasiswa teknik yang cerdas itu ternyata memiliki keterbukaan tertentu pada radikalisme. Kalau demikian, penanganan radikalisme di kampus mestinya juga menyentuh dimensi keilmuan seperti ini agar tidak parsial dan reaktif belaka. Universitas, bagaimanapun juga, adalah sebuah lembaga keilmuan.

Untuk membedah persoalan keilmuan dan radikalisme, kita bisa memperhitungkan pemikiran Bruno Latour mengenai dinamika dasar dari modernitas di Barat, termasuk mengenai kompleksitas kerja ilmu sains. Pemikiran Latour menjadi penting karena gerakan radikal agama-politis, yang seringkali digerakkan oleh ideologi pemurnian (purifikasi), banyak bermunculan pada abad 20 yang adalah era puncak modernitas.

Bagi Latour, modernitas dibentuk oleh sebuah cara pikir yang mendasar, yaitu pemisahan antara hal-hal yang alamiah atau kodratiah (*Nature*) dan budaya/masyarakat (*Culture*) yang terjadi sejak abad ke-17. Kata Latour, “Manusia modern adalah tipe manusia yang percaya pada kategori-kategori murni, misalnya kategori ‘ilmiah, ekonomis, politik, budaya, lokal, global dan sebagainya’” (Blok dan Jensen 2011: 55). Padahal, menurut Latour, fenomena di sekitar kita adalah fenomena yang saling terkait dan terpengaruh, alias *hybrid*. Namun, sekali lagi, pada saat yang sama kita cenderung berpikir bahwa dunia ini dapat dan harus dimengerti melalui kategori-kategori yang jelas dan terpisah-pisah. Modernitas, menurut Latour, ditandai dua cara kerja, yaitu kerja purifikasi (*work of purification*) dan kerja penerjemahan (*work of translation*). Kerja purifikasi adalah upaya praktis dan teoretis (diskursif) yang terus-menerus untuk memisahkan alam (*nature*) dan budaya (*culture*) sebagai dua wilayah ontologis yang berbeda. Sementara itu, kerja penerjemahan adalah segala praktik untuk menciptakan campuran-campuran dan tipe-tipe entitas baru, yaitu segala yang hibrid antara alam dan budaya.

Rahasia yang ada di balik dinamisme masyarakat modern terletak dalam sinergi antara kedua kerja ini. Latour menyebutnya sebagai sebuah *productive paradox*, yaitu sebuah tegangan yang menghasilkan kenyataan yang dinamis. Contohnya, dalam zaman modern lahir teori politik Thomas Hobbes yang mau mengatasi perang dan konflik dengan melampaui mekanisme alamiah (*state of nature*, hukum alam)

dengan cara menciptakan sistem politik perwakilan di mana penguasa disepakati sebagai wakil rakyat berdasarkan kontrak sosial. Menurut Hobbes, pengetahuan yang benar (*true knowledge*) dan bisa diandalkan itu datang dari ilmu matematika. Kalau ditaati, sistem politik berdasarkan perwakilan memiliki kepastian untuk menyatukan warga masyarakat.

Modernitas juga mengenal Robert Boyle, seorang ilmuwan yang memahami panggilan ilmuwan untuk mengobservasi alam secara objektif dalam laboratoriumnya. Lain dengan Hobbes, Boyle tidak menggunakan matematika saja, tetapi juga pelbagai alat yang mahal dan canggih, yang dipamerkan pada rekan-rekannya untuk diobservasi. Metode seperti ini adalah awal dari *experimental science*. Hobbes tidak suka akan cara kerja Boyle ini. Ia curiga, cara kerja Boyle akan menjadi otoritas baru yang ditiru orang dan akan mengacaukan masyarakat. Bagi Hobbes, laboratorium Boyle dan teman-temannya bisa menjadi tempat di mana fakta dimanipulasi atau difabrikasi (Latour 1993: 18ff).

Jadi, Hobbes bekerja untuk merepresentasikan “*pure society*” yaitu masyarakat yang meninggalkan mekanisme politik hukum rimba yang alamiah belaka dan menciptakan ilmu politik murni berdasarkan kontrak sosial (ide mengenai penguasa yang berdaulat) tetapi masih membela objektivitas matematika, dan Boyle bekerja untuk merepresentasikan “alam yang murni” (*pure nature*) tetapi juga “berpolitik” karena ia dan laboratoriumnya adalah otoritas “politik” baru, karena dipercaya sejumlah orang (Latour 1993: *passim*; Blok dan Jensen 2011: 57ff).

Dalam sejarah, perseteruan ini dimenangkan Boyle. Tetapi bagi Latour, keduanya bekerja dengan asumsi “merepresentasikan” sesuatu. Boyle menciptakan prosedur dan perangkat keras yang dibutuhkan oleh ilmuwan untuk merepresentasikan alam (*nature*): instrumen, laboratorium, dan saksi yang tepat, selain pembedaan antara “pendapat” dan “fakta”. Hobbes menciptakan prosedur untuk merepresentasikan politik lewat mekanisme perwakilan atas dasar kontrak sosial. Yang satu menyangkut representasi sains atas alam, yang kedua representasi politik. Keduanya memiliki wilayah tersendiri, tetapi membentuk satu cara pikir yang khas “modern.” Keduanya juga tidak terpisah: Boyle sepertinya mau mengisolasi fakta dari pengaruh luar, tetapi ia sendiri “mengkonstruksi” prosedur, konsep dan *setting* laboratoriumnya (termasuk siapa yang menyaksikan eksperimennya). Ia mengkonstruksi

batas antara yang objektif dan tidak objektif, antara yang ilmiah dan yang bersifat politis, budaya, dan sebagainya. Ia tidak begitu saja masuk dalam sebuah ranah yang murni “alamiah” (Blok dan Jensen 2011:58). Sebaliknya, Hobbes juga tidak hanya merepresentasikan sebuah “masyarakat murni”, melainkan mengkonstruksi sebuah sistem politik di mana sang penguasa politik (*the sovereign*) bisa membela kepentingan warga lewat aparatus negara dan berbagai mekanisme. Seperti Boyle, Hobbes pun tidak memasuki sebuah ranah “masyarakat murni” yang sudah selalu ada, melainkan mengkonstruksinya.

Maka, bagi Latour, keduanya adalah hasil sebuah kerja keras yang harus disebut sebagai “konstruksi” atau komposisi (Blok dan Jensen 2011: 59). Lewat Boyle, kita mendapatkan prosedur agar alam bisa “dimurnikan” atau diperlakukan sebagai sebuah wilayah yang terpisah dan partikular. Lewat karya Hobbes, kita mendapatkan konsep-konsep dasariah untuk menjelaskan bagaimana kepentingan individu-individu bisa disatukan untuk membentuk masyarakat. Dalam pandangan Latour, sebenarnya usaha Hobbes and Boyle ini menghasilkan banyak kenyataan hibrid, yaitu campuran antara faktor manusiawi dan non-manusiawi, antara budaya dan alam. Jelas, bahwa Boyle pun “berpolitik”, dan Hobbes juga berpretensi objektif ilmiah. Namun, kenyataan-kenyataan hibrid ini terus saja tidak digubris. Laboratorium Boyle, dan semua laboratorium sesudahnya, adalah tempat memproduksi kenyataan hibrid, bukan kenyataan murni. Namun, Boyle dan banyak ilmuwan sesudahnya, tidak menganggapnya sebagai hibrid, melainkan sesuatu yang murni. Modernitas takut akan sesuatu yang campuran dan *hybrid*. Usaha untuk merepresentasikan alam dan masyarakat (budaya) secara murni terus dilakukan, sehingga seakan-akan kenyataan itu memang terdikotomi dalam kategori yang murni: alam vs budaya.

Modernitas memang tidak sadar diri bahwa dirinya dibentuk bukan oleh pemurnian, tetapi tetap oleh hibriditas. Maka, Latour mengatakan, kita tidak pernah sungguh-sungguh “modern” karena tidak pernah ada pemurnian yang objektif. Tetapi modernitas tidak seluruhnya negatif, karena modernitas kemudian bergerak dan dinamis dengan asumsi pemisahan dan pemurnian di atas yang dijalankan dengan kerja terjemahan juga. Ilmu sains dan teknik boleh bekerja dengan asumsi untuk memisahkan segala yang alamiah dari hal-hal lain, yaitu budaya, dinamika sosial, dan

pemikiran manusia. Namun, harus diingat pula bahwa proses ini pun adalah sebuah konstruksi yang juga ribet, bukan proses yang “murni dan objektif”. Untuk memotret situasi ini, Latour memakai pendekatan antropologi yang memungkinkannya melihat proses dan kenyataan hibrid itu. Antropologi sains yang dikembangkan Latour menguak bagaimana proses kerja dan penemuan ilmiah di laboratorium itu tidaklah objektif belaka, karena dihasilkan oleh para pelaku (aktor) dalam jaringan yang kompleks (*Actors Network Theory, ANT*).

Sains, sastra, dan humaniora

Latar belakang pendidikan Latour sebetulnya adalah filsafat dan teologi, tetapi kemudian berminat pada sains lewat kajian antropologi. Banyak filsuf memiliki latar belakang ilmu sains (eksakta). Ludwig Wittgenstein sebetulnya belajar teknik mesin (*mechanical engineering*) di Berlin. Ia amat tertarik pada aeronautika dan terobsesi merancang mesin *propeller*. Untuk itu, ia membutuhkan ilmu matematika yang canggih sehingga tertarik pada matematika murni. Hidup pribadinya memang dramatis dan tak selalu bahagia, tetapi eksplorasi lintas ilmu ini ikut memberi makna pada hidupnya.

Michael Serres, filsuf Prancis itu, memulai karirnya dengan studi matematika. Baginya, matematika itu gabungan antara kebenaran yang kokoh dan keindahan. Ia bercerita mengenal studi matematika dari para gurunya: “Gaya para guru kami masih menjadi yang ideal bagiku, di mana kebenaran yang kokoh itu ditemani oleh keindahan—pembuktian matematis yang cepat, tetapi juga elegan dan indah mengagumkan. Bagi mereka, tidak ada tempat bagi usaha yang setengah-setengah, mereka marah kalau kami hanya bisa mengulang-ulang saja, dan mereka hanya menghargai kreativitas dan penemuan baru.” (Serres dan Latour 1995: 7).

Salah satu kelemahan pendidikan tinggi di Indonesia adalah tiadanya atau lemahnya kurikulum inti (*core curriculum*) yang berisikan studi sains dan humaniora (*liberal arts*) yang memungkinkan setiap mahasiswa mengembangkan diri dengan perspektif yang lebih lengkap, tidak hanya berdasarkan bidang ilmunya yang sempit. Dalam bahasa Latour, mahasiswa kemudian bisa memiliki kemampuan “memisah-misahkan” dengan teliti (*work of purification*), tetapi juga bisa dengan kreatif menghubungkan-hubungkan banyak hal (*work of translation*). Mereka mengetahui cara kerja purifikasi,

dengan segala keterbatasan dan ambiguitasnya, tetapi juga sadar akan cara kerja translasi.

Menarik bahwa baru-baru ini juga muncul wacana untuk menciptakan mata kuliah “Pendidikan Umum” (*General Education*) yang diarahkan untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dan memberantas radikalisme. Mata kuliah ini diharapkan bisa menumbuhkan pemikiran kritis, dan paham keagamaan yang toleran. Kata seorang pejabat Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, kurikulum pun ini hendak didasarkan pada basis keilmuan, keindonesiaan, pengembangan karakter, dan internasionalisasi (<https://jpp.go.id/teknologi/pendidikan/304307-tiga-kementerian-sinergi-garap-deradikalisasi-kampus>). Belum jelas benar isi kurikulum seperti ini. Agak mendesak bahwa kurikulum seperti ini memasukkan karya-karya sastra yang tak pernah miskin dari wacana filosofis, etis, dan estetis akan nilai kemanusiaan, kebangsaan atau kebhinekaan, dan religius. Namun, sayangnya, banyak universitas di Indonesia juga mulai dikelola dengan sebuah model bisnis yang dikendalikan pasar, misalnya di bawah bendera “*world class university*”.

Drew Faust, seorang sejarawan yang sekarang menjadi Presiden Harvard University, menengarai bahwa universitas sekarang terlalu dibebani fungsi sebagai penggerak roda ekonomi global. Pemerintah dan dunia bisnis memiliki daya paksa dalam *global knowledge economy*. Faust mengeluh demikian:

Ketika pendidikan tinggi dipahami sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi, pemahaman kita akan identitas dan peran universitas akan terdistorsi. [...] Riset-riset dasarnya dalam bidang ilmu terabaikan karena dianggap tidak memberikan keuntungan cepat atau tidak menyelesaikan persoalan nyata [...] Di Amerika Serikat, dana pemerintah memprioritaskan penelitian yang konvensional dan tanpa risiko (atau *normal science*, dalam bahasa Thomas Kuhn), bukan penelitian yang akan mengubah paradigma. (<http://www.harvard.edu/president/speech/2010/role-university-changing-world>)

Untuk melawan model yang sempit ini, Faust mengusulkan pembelaan terhadap pendidikan humaniora:

Di jantung pendidikan *liberal arts* dan humaniora, juga cara pikir ilmiah adalah kemampuan untuk menginterpretasi, untuk menciptakan makna dan

menafsirkan kenyataan di sekitar kita. Agar kita tidak hanya dibombardir oleh informasi. Pendidikan yang diukur hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi akan melalaikan pertumbuhan kemampuan memaknai kenyataan. Pendidikan seperti ini melupakan kenyataan bahwa semua manusia adalah “pemakna” (*interpreters*)” (<http://www.harvard.edu/president/speech/2010/role-university-changing-world>).

Menurut Faust, yang agak ironis adalah bahwa Cina sebagai salah satu kekuatan global baru malah sangat agresif menggenjot pendidikan humaniora.

“Menularkan Jassin”

Di tengah wacana mengenai radikalisme kampus ini, ada baiknya kita sejenak mengenang HB Jassin yang tahun ini kita peringati. Selama hidupnya Jassin bergerak dalam dunia sastra dan ingin memperkaya “*symbolic reservoir*” bagi masyarakat Indonesia untuk memaknai kenyataan, antara lain dengan menerjemahkan karya sastra dunia, termasuk *Max Havelaar* karya Multatuli, sebuah novel sejarah yang sanggup menerangi pemahaman diri masyarakat Indonesia sendiri.

Orang gampang menjadi radikal, atau “bersumbu pendek,” kata Buya Syafii Maarif, mungkin karena tak lagi membaca sastra, tak lagi berpuisi. Theodor Adorno pernah bertanya: apakah mungkin kita berpuisi atau ber-sastra setelah peristiwa Auschwitz? Pertanyaan ini dijawab oleh teolog Johann Baptist Metz: masih bisa, karena para korban sendiri berpuisi dalam jeritan dan doa selama penderitaan mereka. Banyak dari kita mungkin telah berhenti berpuisi bukan karena trauma akan tragedi tertentu, melainkan karena pendangkalan kehidupan, termasuk kehidupan publik politik yang riuh dan gaduh, juga pendangkalan studi keilmuan di universitas-universitas kita.

Sastra akan memberikan pencerahan makna, tetapi tidak otomatis, karena tergantung pada kekayaan reflektif dan intelektual dari para pembacanya sendiri. Menurut sebuah jejak pendapat oleh DJS Research for Booktrust di Inggris baru-baru ini, sebanyak 45% dari responden mengaku tidak membaca buku dan lebih suka nonton televisi. Di kalangan responden muda, 56% mengatakan lebih suka bermain internet daripada membaca. Salah satu responden mengatakan: “Kita hidup pada tahun 2013, bukan 1813. Kita memiliki

listrik sekarang sehingga kita bisa membeli DVD dan menonton TV, bukan membaca buku lagi. Buku itu untuk orang tua. Orang muda tidak lagi membaca buku.” Fakta ini tentu saja mengkhawatirkan, karena *survey* yang sama mengatakan bahwa orang-orang yang punya kebiasaan membaca merasa kualitas hidup batin mereka menjadi lebih baik. Barangkali situasi di Indonesia lebih buruk. Kita mendengar berita, bahkan *hoax*, tanpa bisa berimajinasi.

Sesungguhnya, ruang imajinasi dan makna yang dibangun sastra adalah ranah yang penuh dengan hibriditas. Makna hidup yang kaya, misalnya, difasilitasi oleh fenomena alam yang dimaknai secara unik dalam puisi “Hujan di Bulan Juni”, karya Sapardi Djoko Damono. Makna sosial juga dibangun oleh masakan dan pengalaman kuliner yang tak berhenti di lidah, melainkan berada dalam keterhubungan dengan interaksi manusia yang kompleks dan kaya dalam bingkai budaya. Dalam hal ini, *Food Science* mungkin harus dipraktikkan secara relatif “murni” sebagai disiplin ilmu, tetapi tidak utuh kalau tidak disertai dengan pemaknaan personal dan kultural seperti yang dilakukan oleh sastra kuliner atau kritik gastronomi, seperti dalam tulisan Yusri Fajar dalam edisi ini. Menikmati kenyataan hibrid seperti inilah yang mungkin sering kita lupakan sebagai bagian dari kemanusiaan kita. ●

Dr. A. Bagus Laksana,

dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

RUJUKAN

- Anders Blok dan Torben Elgaard Jensen, Bruno Latour: *Hybrid Thoughts in a Hybrid World*. Routledge, 2011. Diego Gambetta dan Steffen Hertog, *Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Education*, Princeton University Press, 2016.
- Bruno Latour, *We Have Never Been Modern*, Harvard University Press, 1993.
- Benjamin Popper, “Build-a-Bomber: Why do so many terrorists have engineering degrees?” http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2009/12/buildabomber.html
- Michael Serres dan Bruno Latour, *Conversations on Science, Culture and Time*, University of Michigan Press, 1995.